

# ANALISIS PELAKSANAAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SIMPANG PADANG DURI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Oleh: Ayu Ulfiani Hidayah  
ayu.ulfiani@student.unri.ac.id  
Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si.

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax 0761-63272

## *Abstract*

The street vendors who occupy the street shoulder at Pasar Simpang Padang Duri causing traffic disruption. Implementation of the relocation of street vendors by Bengkalis Government through the Department of Market and Hygiene aims to give a decent place for the vendors and regularity of the market can be maintained. The location provided was adjusted by the number of vendors who will be relocated. However, the vendors are still reluctant to occupy a new location with a variety of reasons. This study aims to investigate the management of implementation and the factors that affect the implementation of the relocation of street vendors in Pasar Simpang Padang Duri. The concept of the theory used is the management theory propounded by G. R. Terry consisting of planning, organizing, actuating, and controlling. This study uses descriptive qualitative research. The data collected through interviews, documentation, and observation. The results showed that the management in the implementation of the relocation of street vendors in Pasar Simpang Padang Duri have done pretty well. And the factors that affect the implementation of this relocation is budget, participation, coordination, and infrastructure. There are still some shortcomings in the implementation of this relocation, so the relocation of street vendors have not reached the goals set earlier.

**Keywords:** *management, street vendors, relocation.*

## **Latar Belakang**

Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau/tidak menetap (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima sebagai kegiatan sektor informal ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik;

2. Tidak memiliki surat izin usaha;
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha, jenis usaha maupun jam kerja;
4. Bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat keramaian;
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang berlari mendekati konsumen;
6. Teknologi yang dipergunakan sangat sederhana;
7. Modal usaha relatif kecil, barang dagangan milik sendiri atau orang lain.

(Alma, 2004: 78)

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin melesat tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga banyak penduduk yang lebih memilih untuk berdagang sebagai rutinitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pedagang dengan modal kecil dan tanpa lokasi berdagang yang memadai inilah yang akhirnya menjadi pedagang kaki lima.

Keberadaan pedagang kaki lima sering kali dipermasalahakan karena berbagai alasan, antara lain:

1. Pemanfaatan ruang publik oleh pedagang kaki lima yang bukan peruntukannya dapat mengganggu aktifitas orang lain
2. Keberadaan pedagang kaki lima menyebabkan kacaunya tata ruang kota
3. Pedagang kaki lima dapat menyebabkan pencemaran lingkungan
4. Menyebabkan kerawanan tindak kejahatan

Sektor informal seperti pedagang kaki lima merupakan dampak dari banyaknya masyarakat miskin dan tidak mengenyam pendidikan formal. Pedagang kaki lima ini muncul dikarenakan kurang tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang berpendidikan. Dikarenakan kurangnya pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan ekonomi yang mencukupi, mereka memilih untuk berdagang di pinggir jalan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan pedagang kaki lima ini dipilih karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, yaitu tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi untuk menjalankannya, tidak membutuhkan modal yang begitu besar, dan mudah untuk mengerjakannya.

Seperti masalah sektor informal pada umumnya, pedagang kaki lima juga menyebabkan sejumlah permasalahan. Awal permasalahan pedagang kaki lima

disebabkan adanya perbedaan antara dua pihak, yaitu pihak pedagang kaki lima dan pemerintah. Saat pedagang kaki lima belum begitu banyak seperti saat ini, keberadaan pedagang kaki lima tidak menjadi masalah yang serius. Namun seiring dengan perencanaan pembangunan yang diikuti dengan menjamurnya usaha disektor informal, pedagang kaki lima menjadi masalah serius dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak, karena pedagang kaki lima tidak hanya sekedar menyebabkan masalah, tetapi juga memiliki potensi positif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu contoh usaha di sektor informal yang mempunyai kontribusi dalam peningkatan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kontribusi pedagang kaki lima ini tidak bisa dianggap remeh, karena kontribusi yang diberikan oleh pedagang kaki lima terbilang cukup besar.

Pedagang kaki lima sebagai unit dari usaha di sektor informal mempunyai potensi yang cukup besar untuk membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, terutama untuk tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk dapat bekerja di sektor formal. Pedagang kaki lima juga mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Kegiatan relokasi pedagang kaki lima yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan solusi dari pelaksanaan ketertiban umum yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dulunya para pedagang kaki lima hanya ditertibkan tanpa diberi solusi agar pedagang kaki lima tersebut tidak kembali menempati lokasi yang bukan peruntukannya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

memberi solusi dengan memberi tempat baru yang sesuai peruntukannya bagi pedagang kaki lima tersebut melalui Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis.

Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis selaku pelaksana kegiatan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Simpang Padang Duri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pasar dan Kebersihan serta tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang pasar dalam dinas ini juga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian di bidang pasar yang meliputi sarana dan prasarana pasar, pengelolaan pasar dan ketertiban pasar. Sehingga Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis inilah yang dijadikan pelaksana dari kegiatan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Simpang Padang Duri.

Selain itu, tugas Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Pasal 3 yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pelaksana ketertiban umum di daerah termasuk penertiban pedagang kaki lima.

Relokasi pedagang kaki lima sebanyak 393 orang di Pasar Simpang Padang Duri tersebut telah dilaksanakan pada 26-27 Februari 2015. Para pedagang kaki lima tersebut dipindahkan ke Pasar Mandau Raya, Pasar Inpres, dan Pujasera. Dengan pembagian pedagang pakaian dan aksesoris ke Pasar Mandau Raya, pedagang sayur dan rempah ke Pasar

Inpres, serta pedagang buah dan makanan ke Pujasera.

Tidak seperti yang diharapkan, beberapa hari setelah relokasi dilaksanakan ternyata para pedagang kaki lima kembali membanjiri bahu jalan Pasar Simpang Padang Duri. Mereka enggan menempati lokasi yang baru dikarenakan berbagai macam alasan. Pemerintah Kecamatan Mandau tidak tinggal diam dengan keadaan ini. Para pedagang kaki lima akhirnya dipindahkan secara paksa atau yang dikenal dengan istilah penertiban. Penertiban ini dilakukan oleh tim gabungan yang beranggotakan Satuan Polisi Pamong Praja 40 orang, Koramil 06 Mandau 5 orang, Polsek Mandau 6 orang, UPT Dishubkominformasi 10 orang dan UPT Dinas Pasar dan Kebersihan 10 orang.

Dengan berbagai pertimbangan, seperti menjamurnya pedagang kaki lima di Pasar Simpang Padang Duri, relokasi yang telah dilakukan oleh instansi terkait, hingga kembalinya para pedagang kaki lima ke bahu jalan Pasar Simpang Padang Duri dan menggunakan bahu jalan sebagai tempat berdagang yang akhirnya menyebabkan kemacetan. Maka peneliti merasa perlu untuk meneliti tentang analisis pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Simpang Padang Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Simpang Padang Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Simpang Padang Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ?

### **Konsep Teori**

Menurut (Terry, 1992: 1) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” atau pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola.

(Terry dalam Badrudin, 2014: 3) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Fungsi pokok atau tahapan-tahapan dalam manajemen merupakan suatu proses yang meliputi hal-hal sebagai berikut sebagaimana yang diungkapkan (Terry dalam Manullang, 2012: 8) yaitu:

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Penggerakkan (*actuating*)
4. Pengawasan (*controlling*)

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Simpang Padang Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, UPT Dinas Pasar dan Kebersihan Kecamatan Mandau, serta Kantor Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau.

### 3. Informan Penelitian

Cara menentukan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu:

1. Kepala Seksi Ketertiban Pasar Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis.

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti melalui wawancara dan observasi.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah jelas dan tersedia yang diperoleh dari instansi terkait sebagai data tidak langsung. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survei, studi historis, dan sebagainya.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara informan dan peneliti untuk mengetahui hal-hal awal mengenai masalah yang diteliti maupun hal-hal yang lebih mendalam.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengambilan data-data melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti file, foto, dan lain-lain.

#### c. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka

observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2007: 165). Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan gambaran sebenarnya dari masalah yang diteliti.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan model interaktif. Dalam model interaktif ada tiga komponen kegiatan yang terjadi secara bersamaan, tiga komponen pokok tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 16)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Simpang Padang Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

#### 1. Perencanaan (*planning*)

Sebelum melaksanakan relokasi pedagang kaki lima, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis telah menetapkan tujuan dari rencana tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja ini adalah untuk mewujudkan adanya ketertiban umum di Kecamatan Mandau.

Data dan informasi mengenai penetapan tujuan yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

*“Relokasi pedagang pada tahun 2014, tujuannya yang pertama adalah untuk memindahkan pedagang dari jalan sudirman untuk kita pindahkan ke pusat jajanan yang kita sebut namanya pujasera dan pasar modern duri.*

*Kedua, ialah untuk memperlancar arus lalu lintas di jalan sudirman duri”.*

*(Wawancara dengan Bapak Suhaimi, S.H. Kepala Seksi Ketertiban Pasar Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis periode 2014-2016. 28 November 2016)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari dilaksanakannya relokasi pedagang kaki lima adalah untuk memberikan tempat yang lebih layak bagi para pedagang kaki lima untuk berdagang. Selain itu, relokasi juga bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas dalam rangka pelaksanaan ketertiban umum di Jalan Jendral Sudirman Duri yang selama ini terhambat akibat padatnya pedagang kaki lima yang menempati bahu jalan. Walaupun pemerintah telah memiliki tujuan yang ingin dicapai, namun masih terdapat rintangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut akibatnya menjadi hambatan dalam pelaksanaan relokasi.

Selain berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga menemukan fakta serupa dari hasil dokumentasi, yaitu tujuan dilakukannya relokasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 800/KPTS/DPK-CEK/2014/256 bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang berjualan di kiri dan kanan jalan Sudirman dan pasar pemerintah lainnya termasuk pedagang kaki lima yang berjualan di jalan-jalan umum yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas perlu dilakukan optimalisasi/sosialisasi terhadap para pedagang yang bersangkutan termasuk wacana pemindahan ke lokasi pasar yang telah di persiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan relokasi pedagang kaki

lima ini tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum Pasal 16 yang berbunyi “Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya baik untuk tujuan berdagang/usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang telah ditunjuk untuk itu”. Dan diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 800/KPTS/DPK-CEK/2014/256

Tentang Penetapan Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Pasar Mandau Raya Kecamatan Mandau pada Mei 2014.

Program yang dijalankan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis sebagai pelaksana kegiatan relokasi pedagang kaki lima, yaitu memberikan fasilitas yang memadai bagi pedagang kaki lima yang direlokasi dengan menyediakan kios, gerobak dan meja untuk berdagang. Bahkan Dinas terkait juga memberikan keringanan dengan membebaskan pedagang kaki lima yang direlokasi dari pungutan retribusi pasar dan biaya kebersihan selama 6 (enam) bulan pertama masa relokasi.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 800/KPTS/DPK-CEK/2014/256

Tentang Penetapan Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Pasar Mandau Raya Kecamatan Mandau dapat diketahui bahwa telah dibentuk tim sebagai pelaksana relokasi pedagang kaki lima di Pasar Simpang Padang Duri. Tim ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan dan sosialisasi pemindahan pedagang

kaki lima Jalan Jenderal Sudirman ke Pasar Mandau Raya termasuk pedagang kaki lima yang berada di Pasar Pemerintah lainnya di Kecamatan Mandau.

2. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemindahan pedagang kaki lima Jalan Jenderal Sudirman ke Pasar Mandau Raya Kecamatan Mandau.
3. Melaksanakan kegiatan/program masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sejalan dengan pemindahan para pedagang kaki lima Jalan Jenderal Sudirman.

## 3. Penggerakkan (*actuating*)

Data dan informasi mengenai penggerakkan dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Kecamatan Mandau yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

*“Kita sering melakukan koordinasi, rapat-rapat ditingkat kecamatan, rapat-rapat tingkat kabupaten, seringa kita lakukan, dengan pkl, koramil, babinsar, dinas perhubungan”.*

*“Pendataan pkl tidak tidak tahun, yang setiap tahun itu penertibannya yaitu 4 kali dalam setahun”.*

**(Wawancara dengan Bapak Suhaimi, S.H. Kepala Seksi Ketertiban Pasar Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis periode 2014-2016. 28 November 2016)**

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penggerakkan telah dilakukan melalui berbagai rapat yang telah dilakukan baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten. Dengan adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan

pembangunan, dalam hal ini relokasi pedagang kaki lima.

#### 4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam mealukan pengawasan, harus ditetapkan suatu standar pengawasan, agar dapat menilai apakah kegiatan pembangunan tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. Data dan informasi mengenai penetapan standar dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Kecamatan Mandau yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

*“Kita kebetulan kalo pengawasan kemarin setelah relokasi itu untuk pengawasan kita limpahkan kepada satpol pp kecamatan mandau, kalau standarnya itu kemarin pengawasan itu sifatnya semacam memakai shift pagi, siang, malam”.*

*(Wawancara dengan Bapak Suhaimi, S.H. Kepala Seksi Ketertiban Pasar Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis periode 2014-2016. 28 November 2016)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa standar yang digunakan adalah standar Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi ketertiban umum di masyarakat. Pengawasan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dan melihat apakah para pedagang kaki lima yang telah direlokasi tidak kembali menempati bahu jalan. Pengawasan ini dilakukan dengan menggunakan shift sebanyak 3 (tiga) kali sehari setelah dilakukannya relokasi.

### **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Simpang**

### **Padang Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

#### 1. Anggaran

Data dan informasi mengenai anggaran yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

*“Faktor yang mempengaruhi relokasi itu yang pertama, faktor yang mendukung pada waktu itu dana, setiap pedagang kaki lima yang direlokasi kita berikan bantuan dana 1 juta”.*

*(Wawancara dengan Bapak Suhaimi, S.H. Kepala Seksi Ketertiban Pasar Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis periode 2014-2016. 28 November 2016)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima ini, anggaran menjadi faktor pendukung keberhasilan kegiatan. Tidak hanya anggaran yang memadai untuk persiapan pelaksanaan relokasi, namun juga untuk memberikan dana bantuan pemindahan kepada para pedagang kaki lima. Dana ini diberikan sebagai bentuk bantuan dari pemerintah kepada pedagang kaki lima yang direlokasi selama masa transisi di lokasi yang baru.

#### 2. Partisipasi

*“Kalau penghambatnya itu boleh dikatakan Dari pedagang kaki lima itu sendiri sulit untuk memindahkannya, karena berbagai macam alasan pedagang kaki lima tersebut”.*

*(Wawancara dengan Bapak Suhaimi, S.H. Kepala Seksi Ketertiban Pasar Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis periode 2014-2016. 28 November 2016)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan relokasi pedagang kaki lima di Kecamatan Mandau ini masih terkendala akibat kurangnya partisipasi dari para pedagang kaki lima itu sendiri dalam membantu Pemerintah Daerah melaksanakan rencana kerjanya.

### 3. Infrastruktur

*“Tempat semua sudah kita siapkan, sudah kita lengkapi, pengamanannya juga sudah ada. Kalo sarana kita waktu itu tidak ada masalah, waktu proses relokasi pedagang kaki lima dari jalan jenderal sudirman ke pujasera dan pasar modern sultan syarif kasim kita sediakan mobil waktu itu, seperti mobil pick up dan truk untuk membantu memindahkan dagangan para pkl tersebut”.*

***(Wawancara dengan Bapak Suhaimi, S.H. Kepala Seksi Ketertiban Pasar Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis periode 2014-2016. 28 November 2016)***

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa infrastruktur dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima ini terbilang memadai. Dilihat dari tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah bagi pedagang kaki lima yang direlokasi dan transportasi yang juga telah disediakan untuk mempermudah para pedagang kaki lima memindahkan dagangannya ke lokasi yang baru.

### 4. Koordinasi

*“Kita kemarin waktu melakukan relokasi kalo perihal koordinasi tidak ada masalah, buktinya kita bisa memindahkan kemarin itu, dari semua*

*elemen di duri itu semuanya ikut kita libatkan seperti LAM, organisasi kepemudaan, dll”.*

***(Wawancara dengan Bapak Suhaimi, S.H. Kepala Seksi Ketertiban Pasar Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis periode 2014-2016. 28 November 2016)***

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Polri, LAM, dan organisasi kepemudaan yang ada di Kecamatan Mandau.

### Kesimpulan

Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan relokasi pedagang kaki lima di Kecamatan Mandau yang berpedoman kepada standar operasional prosedur ketertiban umum yang bertujuan untuk menata pedagang kaki lima dan memperlancar arus lalu lintas demi mewujudkan ketertiban umum di Kecamatan Mandau.

Pengorganisasian dalam penetapan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan relokasi pedagang kaki lima di kecamatan Mandau. Pembagian tugas telah dilaksanakan berdasarkan fungsi masing-masing instansi terkait.

Penggerakkan yang dilakukan dalam memberikan saran, bimbingan, dan motivasi telah dilakukan berkali-kali baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

Pengawasan dari pelaksanaan kegiatan relokasi pedagang kaki lima di Kecamatan Mandau ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana ketertiban umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang mendukung berjalannya pelaksanaan relokasi ini antara lain anggaran yang memadai dan bantuan dana yang diberikan pemerintah kepada pedagang kaki lima yang direlokasi, infrastruktur yang disediakan pemerintah dalam pelaksanaan relokasi dan sarana dilokasi baru, serta koordinasi yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan relokasi ini. Namun, terdapat juga faktor yang menghambat pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yaitu kurangnya partisipasi dan kesadaran dari pedagang kaki lima tersebut untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan relokasi ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. 2004. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa Marketing*. Gramedia: Jakarta.
- Amirullah & H. Budiyo. 2004. *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung.
- Handoko, T. H. 1995. *Manajemen Edisi 2*. BPF: Yogyakarta.
- Harun, R., & E. Ardianto. 2012. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Hasibuan, M. S. P. 1984. *Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah*. Masagung: Bandung.
- Herdiansyah, H. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Manullang. 1981. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Milles, M. B. & A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI-Press: Jakarta.
- Nasution, S. 2011. *Metode Researc (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nawawi, H. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Patilima, H. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Ritonga, H. J. 2015. *Manajemen Organisasi: Pengantar Teori dan Praktek*. Perdana Publishing: Medan.
- Ruslan, R. 2007. *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi*. Grafindo: Jakarta.
- Siagian, S. P. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soehartono, I. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sujianto. 2009. *Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri*. Alfa Riau: Pekanbaru.
- Sumodiningrat, G. 2007. *Pemberdayaan Sosial*. Kompas: Jakarta.
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Terry, G. R. & L. W. Rue. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta.

- Wiludjeng, S. 2007. *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Yahya, Y. 2006. *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu: Yogyakarta.